

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk fungsi artikulasi kepentingan dan fungsi agregasi kepentingan yang dijalankan oleh Partai Aceh. Adanya dominasi Partai Aceh di panggung politik Aceh tentu mempunyai pengaruh dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dapat langsung berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat pada proses kerja Partai Aceh secara kelembagaan dalam melaksanakan fungsi artikulasi kepentingan dan fungsi agregasi kepentingan yang berimplikasi pada pelaksanaan kebijaksanaan berdasarkan kepentingan masyarakat. Penelitian kualitatif ini menggunakan konsep *political linkages* untuk mengidentifikasi pola relasi yang terjadi antara Partai Aceh dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada fungsi artikulasi kepentingan terbentuk *linkage* politik yang karismatik dan bersifat personal sehingga kepentingan-kepentingan yang diartikulasikan tidak mewakili kepentingan masyarakat secara kolektif. Sementara pada fungsi agregasi kepentingan, *linkage* politik yang terbangun cenderung bersifat klientelistik yang dibangun untuk kepentingan praktis para elit partai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya fungsi artikulasi kepentingan yang dijalankan oleh Partai Aceh berpengaruh pada fungsi agregasi kepentingan dimana tidak terdapat suatu kebijakan yang dihasilkan oleh legislator partai yang harusnya berasal dari aspirasi-aspirasi masyarakat. Pola artikulasi kepentingan dari Partai Aceh lebih mengandalkan kedekatan personal dan terbentuk politik *linkage* bersifat karismatik sehingga tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Penyebab utamanya terletak pada model komunikasi yang dibangun antar Partai Aceh dan konstituen yang masih menggunakan corak lama saat masih berstatus sebagai GAM.

Kata kunci : artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, Partai Aceh, politik linkage

ABSTRACT

This study describes the form of the function of the interest aggregation and interest articulation carried out by the Aceh Party. The existence of the Aceh Party's dominance on the Aceh political stage has an influence in the making and implementation that can have a direct impact on the community. Therefore, this research will examine the work process of the Aceh Party institutionally in carrying out the function of articulation of interests and the function of interest aggregation which has implications for the implementation of seeing based on the interests of the community. This qualitative research uses the concept of political relations to identify the pattern of relationships that occur between the Aceh Party and the community. The results showed that the function of articulation of interests formed a charismatic and personal political linkage so that the articulated interests did not represent the interests of the community collectively. Meanwhile, in the function of interest aggregation, the political linkage that is built tends to be clientelistic, which is built for the practical interests of the party elite. This study concludes that the weak function of the articulation of interests carried out by the Aceh Party affects the function of interest aggregation where there are no policies produced by party legislators that should come from people's aspirations. The pattern of articulation of interests from the Aceh Party relies more on personal closeness and the formation of charismatic political relationships so that it does not have implications for the collective welfare of the community. The main reason lies in the communication model developed between Aceh and its constituents which still uses the old style when it was still GAM.

Keywords : interest articulation, interest aggregation, Aceh Party, linkage politics